



Mahalyoboro Tampar Citra Jogja

HS APRESIASI LANGKAH UPT MALIOBORO

JOGJA - Nama Malioboro yang diplesetkan menjadi Mahalyoboro yang sempat menjadi *trending topic* media sosial cukup menyita perhatian Wali Kota Jogja Haryadi

Suyuti (HS). Ya, kasus mahalanya harga warung lesehan "Intan" di pusat wisata Jogja itu menjadi pukulan bagi Pemkot Jogja. Apalagi, jauh-jauh hari pemkot selalu me-

wanti-wanti para pedagang kaki lima (PKL) agar menjaga Jogja nyaman bagi wisatawan. Khususnya saat musim libur Lebaran »
↳ Baca Mahalyoboro... Hal 7



NONGKRONG ASYIK: Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (tiga dari kiri) dan Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi (dua dari kiri) berdiskusi dengan jajarannya di salah satu warung lesehan Malioboro, Sabtu (1/7).

Harus Tegass, Jangan Leda-lede

MAHALYOBORO... Sambungan dari hal 1

UPT Malioboro pun mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi larangan jualan bagi pengelola lesehan "Intan" sejak H+2 Lebaran hingga hari ini.

HS mengapresiasi langkah UPT Malioboro yang didukung komunitas PKL Malioboro. Soal PKL menaikkan harga saat liburan, HS sebenarnya memakluminya. Hanya, tetap harus dalam batas kewajaran. "Kalau enak tenan yo ra popo. Tapi yang wajar lah. Kalau sampai diunggah di media sosial berarti kan dianggap tidak masuk akal," ujarnya di salah satu warung lesehan Malioboro, Sabtu (17) malam.

Sebagaimana diketahui, pada hari kedua Lebaran salah seorang wisatawan mem-posting nota pembayaran lesehan "Intan" yang mencapai Rp 490 ribu untuk tujuh orang. Dalam postingan tersebut harga empat porsi ayam goreng Rp 120 ribu, belum termasuk nasi. Harga nasi Rp 8 ribu per porsi. Sedangkan nasi goreng Rp 40 ribu per porsi.

Meski telah menskrinsing pengelola lesehan selama seminggu, bukan berarti langkah pemkot berhenti sampai di situ. "Nanti akan kami evaluasi lagi. Bisa

saja izinnnya dicabut," ujar Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh Prabowo.

Diikuti Syarif, ulah pengelola lesehan "Intan" bukan *nuthuk* harga. Karena di daftar menu yang disediakan telah tercantum harga. Tapi harga yang dipatok dinilai tidak wajar untuk sekelas lesehan. Syarif mengaku kecewa dengan kejadian itu. "Sudah berulang kali kami sampaikan jangan sampai membuat wisatawan kapok datang lagi," tegasnya.

Demikian pula masalah parkir. Pemkot berulang kali mengingatkan juru parkir (jukir) agar menaati peraturan. Namun, tetap saja ditemukan tarif parkir *nuthuk* selama libur Lebaran.

Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Jogja Ignatius Hanarto memastikan tarif *nuthuk* dilakukan bukan oleh jukir resmi.

Hanarto menjamin jukir resmi memiliki surat tugas dan tidak menaikkan tarif melebihi ketentuan dalam Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Sesuai regulasi, saat libur Lebaran diterapkan tarif progresif. Berupa tambahan tarif 50 persen setiap jamnya dari tarif normal. Namun, menurut Hanarto, ma-

Kalau enak tenan yo ra popo. Tapi yang wajar lah. Kalau sampai diunggah di media sosial berarti kan dianggap tidak masuk akal."

Haryadi Suyuti
Wali Kota Jogja

sih banyak orang tak paham aturan tersebut dan menuding jukir menaikkan tarif seandainya. "Padahal dia (pengguna jasa) parkirnya berjam-jam, ada yang bahkan sampai pukul 01.00 di sini hari," ungkapnya.

Kendati demikian, Hanarto tak menampik adanya jukir liar. Seperti tujuh jukir yang beroperasi di Jalan Beskalan, Ketandan, Jalan KHA Dahlan, dan di depan Jogjatronik. Mereka disanksi tindak pidana ringan. Mereka telah diberi sanksi tindak pidana ringan. "Ada yang membuat karcis dan ditulis tarif sendiri. Ada juga yang menggunakan karcis keluaran 2002," bebarnya.

HS juga bereaksi soal tarif parkir *nuthuk*. Menurutnya, tak masalah jika ada wisatawan yang

memberikan uang melebihi tarif parkir. Asal sama-sama ikhlas. Jukir pun memintanya tidak boleh dengan memaksa. "Kalau ini sama saja dengan premanisme. Ini yang harus ditindak.

Saya tidak ingin ada wisatawan diintimidasi dan dipalak. Warga Jogja tidak seperti itu," ucapnya. HS menilai langkah yang diambil oleh jajarannya dalam menindak praktik premanisme semacam itu sudah benar. Bahkan, dia meminta aparat yang berwenang tidak ragu menindaklanjuti semua pelanggaran yang ada di Kota Jogja dengan tindakan tegas, terukur, dan konkret. "Jangan leda-lede," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi berjanji mengevaluasi kebijakan maupun pelaksanaan teknis pelayanan selama libur Lebaran. Terutama soal parkir. Dia berharap, rancangan peraturan daerah tentang perparkiran yang sedang dibahas di DPRD Kota Jogja mengatur soal tarif. Supaya kasus *nuthuk* parkir tak terulang. Khususnya saat perayaan libur Idul Adha dan akhir tahun mendatang. "Sehingga tidak ada lagi keragu-raguan aparat jika akan menindak," katanya. (pra/yog/ga)



KULINER KHAS JOGJA: Wisatawan memadati warung lesehan Malioboro akhir pekan lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005